

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Acmad Ichsan, *Hukum Perdata* (Jakarta: P.T Pembimbing Masa, 1969)
- A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002)
- B. F. Sihombing, “*Sejarah Hukum Tanah Indonesia*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007)
- D. Romi Sihombing, *Cacat Administrasi Pembatalan Sertifikat Tanah Oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2022)
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1989)
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: penerbitan universitas, 1966)
- Hanafi, *Hukum Agraria: Diktat Hukum Agraria*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016)
- H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2018)
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1978)
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan dan Hak Tanggungan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002)
- Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006)
- M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit perbankan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007)
- Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016)

- Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori, dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2016)
- Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- Rusmanto Hadiman, *Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Suatu Tinjauan Yuridis Praktis*, (Bandung: Eresco, 2011)
- Salim HS, et.all, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (buku ketiga)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009)
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Universitas Pelita Harapan, (Jakarta: Fakultas Hukum UPH, 2022)
- Sudharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Supriadi, *Hukum Agraria*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016)
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012)
- Umar Said Sugiharto, et.al, *Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Wahid Muchtar, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah*, (Jakarta: Republika, 2008)
- Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019)

## **JURNAL**

- Andina Alfia Rizqi, “Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)”, *Jurnal Notarius*, Vol. 11, No. 2, 2018. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v11i2.23459>

Septina Marryanti dan Arsan Nurrokhman, “Kepastian Hukum Hak atas Tanah: Pelajaran dari Kekalahan Perkara Pertanahan di Pengadilan”, Jurnal Pertanahan, Vol. II No. 2, November 2021.

## **HASIL PENELITIAN**

Reza Pahlevi, “Praktik Pendaftaran Tanah secara Sporadik di Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor”. Tesis, Jakarta, Program Studi Kenotariatan Universitas Indonesia 2007

Wibowo, “Surat Keterangan Tanah dan Kaitannya Dengan Pengakuan Tanah-Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Belum Bersertipikat”. Tesis, Jakarta, Program Studi Kenotariatan Universitas Indonesia 2015

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diubah Oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang dan terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang

## **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor Putusan Nomor:  
27/G/2021/PTUN.JBI

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor Putusan Nomor:  
59/B/2022/PT.TUN-MDN

Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Nomor: 497K/TUN/2022

## **KAMUS**

W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1960)

## **WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Putra Hutomo, Notaris/PPAT, Kantor Notaris/PPAT  
Christina Dwi Utami, Jakarta, Tanggal 10 November 2023, Pukul 18.00 WIB

Hasil wawancara dengan Joko Subagyo, Direktur Penanganan Perkara Pertanahan  
Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata  
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kementerian Agraria dan Tata  
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, Tanggal 8 Desember, Pukul  
13.30 WIB